

“Perilaku Memilih Masyarakat pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Kendal 2010”

**Muhamad Riska Aditama**

NIM. D2B006046

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Diponegoro, Semarang – 2013

### **ABSTRAKSI**

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan suatu tindakan memilih pemimpin yang dapat memimpin dengan baik daerahnya. Kecenderungan untuk memilih salah satu kandidat dalam pemilihan umum kepala daerah terbentuk oleh suatu perilaku pemilih yang telah dibentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik probability sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kandidat (figur pasangan calon) mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap perilaku pemilih, karena pemilih melihat kandidat dari citra suatu kandidat. Faktor lain adalah visi/misi pasangan calon juga mempengaruhi perilaku pemilih selain kesamaan agama dengan kandidat yang dipilih. Hasil analisa juga menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat Kabupaten kendal masih dipengaruhi oleh “politik uang” walaupun pada dasarnya mayoritas masyarakat Kendal memiliki partisipasi yang tinggi dalam Pemilu serta sadar akan haknya sebagai warga negara.

Kata kunci : PEMILUKADA, perilaku memilih

## A. PENDAHULUAN

Salah satu agenda yang penting dalam proses perubahan politik adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Makna pemilu yang paling essential bagi suatu kehidupan yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perubahan kekuasaan (pengaruh) yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika, sehingga sirkulasi elit politik kekuasaan dapat dilakukan secara damai dan beradab. Lembaga tersebut adalah produk dari pengalaman sejarah manusia dalam mengelola kekuasaan, dimana kedaulatan rakyat menjadi sumber kekuasaan itu sendiri. Dalam bahasa yang lebih populer manajemen kekuasaan itu disebut demokratis<sup>1</sup>.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokratis, menyatakan dalam UU bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang negara Republik Indonesia<sup>2</sup>.

Setiap sistem demokratis adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka dilembaga perwakilan. Namun demokratis paling umum dimaknai sebagai tatanan kehidupan dimana warga negara menikmati kebebasan dan hak-hak dasarnya, serta ada jaminan hukum agar warga negara mampu untuk mengekspresikan aspirasinya secara maksimal dan terbuka.

Prinsip dasar kehidupan yang demokratis adalah tiap warganegara ikut aktif dalam proses politik. Demokratis baru siap berjalan kalau pencapaian tujuan-tujuan dalam masyarakat diselenggarakan oleh wakil-wakil rakyat dilaksanakan dalam suatu *representative government*

---

<sup>1</sup> Koiruddin, Profile pemilu 2004, yogyakarta.pustaka pelajar, 2004 hal xii

---

<sup>2</sup> Uu no.12 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 tentang pemilu

yang dibentuk berdasarkan hasil suatu Pemilu.

Kini melalui Undang-Undang No.32 tahun 2004 pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah secara langsung tidak lagi melalui DPRD, melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah langsung ini dilakukan antara lain untuk memutus mata rantai oligarki-oligarki partai yang mewarnai kepolitikan di DPRD, dimana kepentingan partai bahkan kepentingan segelintir elit partai kerap memanipulasi kepentingan masyarakat secara luas.

Pemilihan kepala daerah secara langsung juga merupakan wujud nyata terhadap azas responsibilitas dan akuntabilitas. Melalui pemilihan secara langsung, Kepala daerah harus dapat mempertanggungjawabkan urusan pemerintahannya secara langsung kepada rakyat. Pemilihan kepala daerah lebih *accountable* dibandingkan sistem yang sebelumnya digunakan, karena rakyat tidak harus

menitipkan suaranya melalui DPRD, tetapi rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kriteria yang jelas dan lebih transparan.

Kepala daerah yang terpilih nantinya juga dituntut untuk merumuskan sebuah kebijakan atau peraturan untuk merumuskan sebuah kebijakan ataupun peraturan yang bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dari pengalaman-pengalaman ini diharapkan akan mampu melahirkan politisi-politisi atau pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat dan memiliki kapabilitas untuk dapat bersaing ditingkat nasional tentunya.

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku, yakni :<sup>3</sup>

- *Apatis*, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik

---

<sup>3</sup> Jurnal.dikti.go.id

- *Spectator*, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu
- *Gladiator*, yaitu orang-orang yang selalu aktif dalam proses politik
- Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk konvensional

Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam pemerintahan. Ada banyak bentuk partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (*Voting Behavior*), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut partai politik dan lain sebagainya. Perilaku masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu. Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figure calon pemimpin yang dapat dipercaya. Didalam pemilu, rakyat yang telah

memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figure yang dinilai sesuai dengan aspirasinya.<sup>4</sup>

Pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah kabupaten Kendal periode 2010-2015 dilaksanakan pada hari minggu, 6 Juni 2010, masyarakat Kabupaten Kendal mengadakan pesta demokrasi melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan data KPUD Kendal, jumlah pemilih yang terdaftar saat ini dalam DPT ada 732.017 orang yang tersebar di 265 desa, 20 kelurahan sehingga total ada 285 PPS yang ada di Kabupaten Kendal. Hasil perolehan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal periode 2010-2015 sebagai berikut :

Pada pelaksanaan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di Kabupaten Kendal terdapat

---

<sup>4</sup> Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Jakarta : Fokusmedia, 2007, hal.173-174

732.017 pemilih dari 899.211 jiwa jumlah penduduk, yang terdiri dari 443.974 penduduk laki-laki dan sebanyak 455.237 penduduk perempuan. Namun demikian, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hanya 60% (441.613 penduduk) yang menggunakan hak suaranya sedangkan 40% sisanya atau sebesar 288.043 memilih untuk berperilaku apatis. Data di atas juga menunjukkan bahwa pemilu di Kabupaten Kendal dimenangkan oleh pasangan Widya Kandi Susanti – Muh Mustamsikin dengan 189.831 suara dari 8 Kecamatan yang mempunyai suara terbanyak yakni Kecamatan Boja, Gemuh, Kaliwungu, Limbangan, Plantungan, Rowosari, Singorojo, Sukorejo dan Weleri.

Kemenangan pasangan Widya Kandi Susanti – Muh Mustamsikin tentunya tidak lepas dari partisipasi masyarakat untuk mencoblos pasangan tersebut pada Pilkada. Jumlah suara yang signifikan menjadi

tolak ukur penentuan bagi siapa yang berhak memimpin pemerintahan lima tahun ke depan. Adapun partisipasi masyarakat dalam pemberian suara merupakan suatu bentuk perilaku memilih yang dilandasi oleh berbagai faktor, baik itu interen dan eksteren yang nantinya akan mempengaruhi perolehan suara. Faktor interen berupa kesadaran sendiri atas dasar kualitas dan kapabilitas yang dimiliki kandidat dan faktor eksteren berupa lingkungan dan status sosial (tingkat ekonomi, pendidikan, dll). Status sosial yang tinggi biasanya lebih partisipatif dibandingkan dengan yang lebih rendah dan ini telah menjadi paradigma.

Menjadi suatu ketertarikan bagi peneliti, untuk meneliti masyarakat Kabupaten Kendal. Daerah ini secara geografis terbagi menjadi 2 daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan) yang terbagi menjadi 20

Kecamatan dengan 265 Desa serta 20 Kelurahan. Melihat kemenangan pasangan Widya Kandi Susanti dan Mustamsikin yang memiliki suara terbanyak di Kecamatan Boja, weleri, singorojo dan kaliwungu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan tersebut menang di Kecamatan tempat tinggal mereka.

Pada dasarnya perilaku memilih (*Voting Behavior*) dalam suatu pemilu memiliki beberapa pendekatan antara lain, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Pada pendekatan sosiologis, perilaku pemilih dipengaruhi oleh karakter sosial dan pengelompokan sosial berdasarkan umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama, situasi-sosial, ekonomi, aspek geografis dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Dalam kemenangan pasangan YAKIN dapat dilihat bahwa agama merupakan faktor sosiologis yang sangat kuat

dalam mempengaruhi sikap pemilih. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh Mustamsikin yang merupakan tokoh agama di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan pendekatan psikologis, menekankan pada tiga aspek psikologis yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Artinya sikap dan kepribadian calon kandidat merupakan variabel penentu yang mempengaruhi perilaku pemilihnya. Dari pendekatan psikologis jelas sekali terlihat bahwa pendukung pasangan YAKIN sebagian besar berasal dari tokoh agama, masyarakat Islam dan pondok pesantren (Kecamatan kaliwungu, Gemuh) yang mendukung Mustamsikin serta masyarakat nelayan dan wirausaha yang mendukung Widya Kandi seperti pada Kecamatan Weleri, sukorejo, singorojo dan rowosari.

Pendekatan rasional dapat disimpulkan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para

---

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, op.cit, hal.145

pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap visi, misi dan program kerja partai dan kandidat. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, dan tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangannya yang logis. Dalam kasus pemilukada Kabupaten Kendal faktor situasional berupa isu-isu serta peristiwa-peristiwa politik calon kandidat tidak menjadi pertimbangan yang penting bagi para pemilih. Artinya para pendukung pasangan YAKIN bukan merupakan pemilih yang rasional melainkan pemilih yang irasional. Hal tersebut dapat disimpulkan dari perilaku pemilih yang tidak terpengaruh oleh kejadian politik sebelumnya yang dialami pada masa kepemimpinan suami dari

Widya Kandi Susanti yang terjerat kasus korupsi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, diperoleh permasalahan dalam memilih pada Pilkada Kabupaten Kendal 2010 antara lain : *Pertama* adalah lebih dari 40% warga berperilaku apatis dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal 2010, sehingga mereka memilih untuk melakukan aktivitas lainnya dari pada datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk menggunakan hak pilih mereka.

*Kedua* adalah adanya *money politic* atau politik uang. Pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses dilakukan secara terang-terangan, guna mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Hal ini peneliti dapat dari *Participant Observation* dimana peneliti melihat dan mengalami sendiri ajakan dari salah satu tim sukses pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa perilaku memilih masyarakat Kendal juga dapat dipengaruhi oleh politik uang.

*Ketiga* adalah kampanye lebih menonjolkan citra kandidat dibandingkan berbicara tentang kinerja dan program-program pasangan calon. Mereka lebih membangun citra, dengan melakukan aktivitas yang tidak bisa dilakukan sebelum mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada akhirnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program kerja para calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal 2010, yang mereka ketahui adalah sosok pribadi para calon tersebut.

Dari penjelasan permasalahan diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemilih merupakan pemilih irasional, yaitu pemilih yang tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai kandidat dengan visi dan misinya,

melainkan lebih pada faktor-faktor sosial, agama, serta faktor lain yang semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Dengan permasalahan - permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat Kendal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Perilaku pemilih**

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para konsestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada konsestan yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Dinyatakan sebagai pemilih dalam Pilkada yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih.

Adapun perilaku pemilih menurut Surbakti adalah: “Aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau

---

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti, *ibid.*, hal 144



tidak memilih (*to vote or not vote*) didalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung). Bila voters memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tetentu.<sup>7</sup>

Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu :<sup>8</sup>

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi, terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu

tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang.

c. Pendekatan Rasional

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku memilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analog antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya secara rasional, yakni memberikan suara ke OPP yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian.

---

<sup>7</sup> Ramlan Surbakti, Partai, Pemilu dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997. Hal 170

<sup>8</sup> Muhammad Asfar, Pemilu dan Perilaku Memilih 1995-2004. Pustaka Eireka

## 2. Jenis-jenis pemilih

### a. Pemilih rasional

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu.

### b. Pemilih kritis

Proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui 2 hal yaitu *pertama*, jenis pemilih ini menjadi nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. *Kedua*, bisa juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang

ditawarkan sebuah partai/kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem partai ideology dengan kebijakan yang dibuat.

### c. Pemilih tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti

yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan lainnya dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

d. Pemilih skeptis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideology yang cukup tinggi dengan seorang kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi

pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi kondisi Daerah atau Negara.

## C. Metoda Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti dan menjadi pokok permasalahan. Nawawi mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai : “Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (Seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain)”.

### 2. Jenis data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat

digolongkan dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer dalam penelitian ini berasal dari responden yang memberikan suara dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kendal 2010. Dengan menggunakan rumus *slovin* dihasilkan sampel sejumlah 100 orang dari jumlah populasi 732.017 orang. Responden merupakan penduduk Kabupaten Kendal yang memberikan suaranya pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 yang berlatar belakang pendidikan minimal SMP atau responden yang bisa baca dan tulis. Teknik pengumpulan dilakukan dengan memberikan kuesioner pada responden dan kemudian dilakukan pengolahan data untuk dianalisa.
- b. Data Sekunder, yakni semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian.

#### **D. Analisis**

Berdasarkan pengamatan penulis masyarakat Kabupaten Kendal diklasifikasikan kedalam tiga kelas, diantaranya: kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Selanjutnya dapat dikategorikan sebagai berikut:

Masyarakat kelas atas adalah memiliki status sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, yaitu diantaranya: Pimpinan Daerah terdiri dari Bupati, wakil bupati, sekda, kepala bagian, kepala dinas, pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik.

Kelas menengah adalah masyarakat yang status sosialnya sebagai tempat masyarakat umum untuk berhubungan dengan masyarakat kelas tinggi, yaitu diantaranya Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Camat, polisi pamong praja, dan stafnya, kepala cabang dinas (dinas pendidikan), kepala sekolah dan guru SDN, SMP, SMA. Pegawai Honorer Daerah terdiri dari Staf administratif honorer di kantor kecamatan, polisi pamong praja (Pol PP) honorer di kantor kecamatan, guru SDN, SMP, SMA honorer,

masyarakat tani yang memiliki lahan basah seluas diatas satu hektar, masyarakat peternak yang memiliki hewan diatas 10 ekor.

Masyarakat kelas bawah adalah masyarakat umum yang tidak memiliki akses potensial terhadap Negara (pemda), yaitu diantaranya: Pegawai honorer tidak tetap atau pegawai suka rela. Pegawai tersebut berada pada kantor kecamatan (staf administrasi dan Pol PP), sekolah SD, SMP, dan SMA, pada dinas-dinas daerah yang ada pada lingkungan kecamatan (kantor cabang dinas pendidikan), masyarakat tani memiliki lahan kering yang penghasilanya tidak menentu.

Ketiga kelas masyarakat diatas memiliki sikap politik yang berbeda dalam menetapkan pilihan politiknya. Hal ini disebabkan oleh adanya tujuan dan kepentingan politik yang berbeda pula. Hanya saja interaksi politik mereka tidak dibatasi oleh tingkatan kelas yang disebutkan tadi. Mereka saling membaur guna saling mempengaruhi dan menawarkan kepentingan masing-masing.

1. Relasi fakta sosial dan teori pertukaran sosial George Homans dan Peter M. Blau

Dinamika politik Pilkada Kabupaten Kendal yang dijelaskan diatas merupakan bagian dari fakta sosial (realitas sosial) yang dapat dijelaskan dengan teori pertukaran sosial George Pascar Homans yang memandang perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Teori Homans ini berangkat dari asumsi ekonomi dasar (pilihan rasional), yaitu individu memberi apa dan mendapatkan apa, apakah menguntungkan atau tidak. (Ritzer 2009:458).

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kendal tahun 2010, individu sebagai masyarakat melakukan aktivitas politik seperti yang digambarkan Homans tersebut, yaitu saling melakukan pertukaran kepentingan politik.

Mengingat yang terlibat dalam proses politik tidak sebatas individu namun juga melibatkan kelompok sosial (struktur sosial) yang lebih besar, dan pada kasus ini

kelompok tersebut memberikan pengaruh besar dalam mengarahkan keputusan politik individu. Oleh karena itu, perlu menggunakan teori pertukaran sosial Peter M. Blau.

Tujuan dari teori pertukaran sosial Peter Blau adalah “memahami struktur sosial berdasarkan analisis proses - proses sosial yang mengatur hubungan antar individu dengan kelompok”.(Peter Blau dalam Ritzer,2009:458).

Menurut Ritzer analisis proses sosial bagi Blau adalah memahami struktur sosial atau kelompok sosial sebagai upaya untuk memahami perilaku individu yang merupakan bagian dari kelompok sosial itu.

“Kita tidak dapat menganalisis proses - proses interaksi sosial antar individu selain dari struktur sosial yang ada di sekitarnya”. (Ritzer menyimpulkan pemahaman Peter Blau tentang teori Pertukaran Sosial, 2009:458)

Perilaku politik masyarakat di kabupaten Kendal sebagian besar diarahkan oleh struktur sosial di sekitarnya, biasanya dialami oleh masyarakat *middle class* dan *lower*

*class*. Keputusan politik masyarakat tersebut seringkali mengikuti kelompok - kelompok sosial yang mereka percayai dan memberikan keuntungan atau imbalan bagi mereka. Keputusan politik pegawai honorer, baik honorer daerah maupun honorer suka rela tergantung dari arahan struktur organisasi pegawai tempat mereka bekerja.

Pilihan politik bawahan tergantung pilihan politik atasan, tentu pilihan politik atasan tergantung instruksi pimpinan daerah. Jadi arah politik atasan bawahan terlembaga dan memiliki struktur yang jelas. (Jawaban Ahmad (responden) ketika ditanya siapa yang mempengaruhi pilihan politiknya).

Perilaku politik responden diatas menunjukkan adanya intervensi struktur sosial yang ada di sekitarnya. Meskipun demikian, jika ditelusuri lebih lanjut kenapa responden itu mengikuti dan cenderung bisa diarahkan oleh struktur sosialnya dalam menentukan pilihan politiknya. Pada konteks inilah kita membutuhkan teori pertukaran sosial George Caster

Homans, tercermin dari sikap responden berikut ini :

Saya mengikuti atasan karena saya memiliki kepentingan untuk diri saya sendiri dan langkah itu sama - sama menguntungkan. Saya memberikan suara untuk atasan dan atasan saya memberi jaminan untuk karir saya, ya paling tidak honorer suka rela menjadi honorer daerah, dan syukur- syukur saya menjadi pegawai negeri sipil. Itu alasan kenapa pilihan politik kita mengikuti pilihan politik atasan. (Ahmad, Pegawai Honorer).

Dari kasus responden diatas menggambarkan kepada kita adanya hubungan simbiosis mutualisme antara perilaku individu dengan struktur sosial di sekitarnya. Kesimpulannya adalah memahami perilaku politik masyarakat perlu menggunakan pendekatan integrasi antara teori pertukaran Homans dan Peter Mblau.

2. Pertukaran Nilai, Individu dan Partai Politik sebagai kelompok sosial

Menurut M. Blau peran nilai dalam hubungan antar kelompok sosial sangat dibutuhkan. Karena

dengan nilai kelompok- kelompok sosial dalam berinteraksi dapat terintegrasikan dan tercipta solidaritas antar mereka.

Partai politik yang melakukan koalisi dalam menyatukan kekuatan politik adalah fakta sosial yang memperkuat argument M. Blau terkait peran nilai dalam kelompok sosial itu. Koalisi partai politik ada aturan dan nilai sebagai ikatan politik mereka. Dengan itu koalisi akan terjaga dari kepentingan individu yang ada didalam partai politik itu sendiri.

## **E. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

- a) Masyarakat Kabupaten Kendal memiliki partisipasi yang tinggi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010
- b) Masyarakat Kabupaten Kendal mayoritas menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2010 karena masyarakat sadar akan haknya sebagai warga negara dan masyarakat berharap melalui Pemilu tersebut akan dapat melahirkan pimpinan yang nantinya mampu membawa Kendal kearah yang lebih baik.

- c) Perilaku memilih warga Kabupaten Kendal Tahun 2010 juga masih dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti “politik uang”. Politik uang yang terjadi dalam PILKADA Kabupaten Kendal tahun 2010 yaitu seperti pada masa kampanye masyarakat diberi sejumlah uang oleh tim sukses pasangan calon agar mengikuti kampanye atau sekedar datang dalam acara kampanye pasangan calon yang sedang melakukan kampanye, politik uang juga terjadi pada saat mendekati hari pemungutan suara yaitu

sehari sebelumnya tim sukses dari pasangan calon memberi atau membagikan sejumlah uang kepada masyarakat agar memilih salah satu pasangan calon yang dalam istilah masyarakat Kendal biasa disebut “Serangan Fajar”.

- d) Masyarakat Kabupaten Kendal cukup sportif dengan hasil suara PILKADA Tahun 2010 walaupun pasangan calon yang mereka pilih ternyata kalah dalam pemilihan, akan tetapi mayoritas dari mereka menerima hasil PILKADA Tahun 2010, itu bisa dilihat dari tidak adanya protes dari pihak pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kalah dalam PILKADA serta tidak adanya demo atau kerusuhan dari pendukung atau kader pasangan calon yang kalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa



masyarakat Kabupaten Kendal cukup sportif dengan hasil PILKADA Tahun 2010 di Kabupaten Kendal.

- e) Perilaku memilih masyarakat Kabupaten Kendal dipengaruhi oleh bentuk kampanye seperti tatap muka langsung dengan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan juga dipengaruhi oleh media kampanye berupa spanduk, baliho dan stiker. Dimana bentuk dan media kampanye tersebut merupakan media kampanye yang paling menarik, meyakinkan dan yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Kendal.
- f) Faktor figur pasangan calon juga lebih mempengaruhi pemilih dalam pemilihan dan mayoritas dari mereka menyatakan bahwa citra pasangan calon yang

menjadi pertimbangan mereka dalam memilih. Citra pasangan calon yang menarik untuk masyarakat yang dimaksud disini dapat dilihat dari pasangan calon yang terpilih Widya Kandi Susanti dan Mustamsikin yaitu dari cara berbicaranya pada waktu melakukan kampanye sangat meyakinkan masyarakat untuk memilihnya serta mempunyai visi dan misi yang jelas, memiliki paras yang rupawan, pada saat kampanye pasangan calon ini melakukan bentuk kampanye turun langsung ke desa-desa, pasar dan tempat-tempat yang merupakan ajang berkumpulnya masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal, dan juga Mustamsikin atau wakil pasangan calon terpilih merupakan murid dari Ulama yang sangat berpengaruh di Kabupaten Kendal sehingga secara

tidak langsung masyarakat percaya dan memilhnya.

- g) Mayoritas warga Kabupaten Kendal menerima hasil PILKADA Tahun 2010 dan mengaku percaya dan berharap bahwa dalam pemilu kali ini pasangan yang terpilih sekarang mampu membawa Kendal kearah yang lebih baik.

## **2. Saran**

- a) Faktor figur memiliki peran bagi keterpilihan calon

dalam PILKADA, maka parpol sebagai lembaga yang dominan dalam memunculkan calon perlu hati-hati dalam menentukan figur yang akan diusung.

- b) Faktor politik uang ditemukan marak dalam PILKADA, maka dalam hal ini peran serta penegak hukum dalam PILKADA, terkait politik uang sangat diperlukan agar politik uang dapat diminimalisir atau tidak ada lagi politik uang dalam PILKADA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya: Pusdeham-Eureka, 2006
- Asfar, Muhammad, *Mendesain Management Pilkada*, Penerbit Pustaka Eureka, 2007
- Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Consuelo, G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993
- Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi). 2007. Kriteria Jurnal Internasional. [www.dikti.go.id/archive2007/p3m/files/akreditasi\\_jurnal/KJI.doc](http://www.dikti.go.id/archive2007/p3m/files/akreditasi_jurnal/KJI.doc). [23 Mei 2013]
- Firmanzah, *Marketing Politik*, Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Horald, F Gosnel. 1934, *Ensyklopedia of the Social Science*, New York: Mc Grew Hill Book Company
- Imawan Riswanda dan Gaffar Affan, *Analisis Pemilihan Umum 1992 di Indonesia*, Penelitian universitas gajah mada hal 12-13
- Ingnas Kleden, *Pemilu Langsung Di tengah Oligarki Partai*, Penerbit Gramedia pustaka, 2005
- Ismanto, Ign, *Pemilihan presiden secara langsung 2004: dokumentasi, analisis, dan kritik*, Galangpress Group, 2004
- Juliansyah, Elvi, *Penyelenggaraan Pilkada*, Penerbit Mandar Maju, 2005
- Koiruddin. *Profile pemilu 2004*, yogyakarta.pustaka pelajar, 2004 hal xii
- Marijan, Kacung, *Demokratisasi Di Daerah Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*, Penerbit Kompas, 2007
- Nursal, Adman, *Political Marketing : teori umum perilaku pemilih*, Penerbit Gramedia Pustaka, 2004
- Nazir, H., *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Prihatmoko, Joko j., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2005
- Ranadireksa, Hendarmin, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Jakarta: Fokusmedia, 2007
- Supriyatno, Didik, *Menjaga Independensi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada*, Penerbit Perlumdem, 2007, hal. 81.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992
- Surbakti, Ramlan, *Partai, Pemilih dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 Tentang Pemilu  
-----, *Peraturan Dalam Pilkada*, Penerbit Sinar Grafika  
-----, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Penerbit Mseada Abadi